

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 13
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juni 2021
Waktu : 10.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
2. ABT 2021;
3. RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022; dan
4. Isu-isu Aktual.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan sekaligus Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);

6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian);
10. Dr. Ir. Agung Hendriadi M. Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
11. Achmad Bakir Pasaman (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*);
12. Karyawan Gunarso Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
13. Maryono Direktur Utama PT Pertani (Persero);
14. Harry Warganegara Direktur Utama PT Berdikari (Persero); dan
15. Frans Marganda Tambunan, Kuasa Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021, ABT 2021, RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan perubahan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 semula sebesar Rp19.970.464.957.000,00 (sembilan belas triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.801.161.386.000,00 (sembilan belas triliun delapan ratus satu miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan komposisi anggaran per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.493.965.501.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp4.905.882.241.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp813.416.356.000,00 (delapan ratus tiga belas miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.367.409.240.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp2.025.396.793.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp4.480.053.080.000,00 (empat triliun empat ratus delapan puluh miliar lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
 - h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.479.115.106.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima belas juta seratus enam ribu rupiah);
 - i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.363.228.674.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - j. **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp553.380.073.000,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
 - k. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.219.314.322.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp692.150.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Realokasi anggaran internal:
 - 1) **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp276.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a) Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar rupiah) untuk *Combine Harvester & Dryer*, Program Padi Sehat, dan Pestisida Nabati;

- b) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek;
 - c) Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP; dan
 - d) Rp29.100.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus juta rupiah) untuk Pengembangan Padi Hibrida.
- 2) **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) dengan rincian;
- a) Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Benih Sayuran;
 - b) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Pestisida Nabati;
 - c) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - d) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP.
- 3) **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian;
- a) Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk Pestisida Nabati;
 - b) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - c) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP.
- 4) **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:
- a) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - b) Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ayam di BPTP.
- 5) **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp52.800.000.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:
- a) Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk Alsintan Traktor Roda empat; dan
 - b) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek.
- 6) **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek.

- b. Realokasi anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp271.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang dialokasikan pada:
- 1) **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk asam formiat tanaman karet;
 - 2) **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah); dengan rincian: Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk bantuan sapi dan Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) untuk pengembangan sapi Sumba *Ongole*;
 - 3) **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk Alsintan Traktor Roda Empat;
 - 4) **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) untuk bimtek dan pelatihan; dan
 - 5) **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk penguatan karantina pertanian.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai usulan Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp14.510.592.752.000,00 (empat belas triliun lima ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) 2022 Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan Nomor B.238/M.PPN/D.8/PP/04.02/04/2021, dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
- a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.658.813.463.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp1.766.657.995.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp1.044.515.027.000,00 (satu triliun empat puluh empat miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

- e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.309.571.537.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp1.853.107.362.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp2.689.229.723.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.319.023.425.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.091.607.600.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- j. **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp577.387.762.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
- k. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.103.001.331.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merancang ulang program, kegiatan, dan anggaran per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian tahun 2022, berdasarkan evaluasi tahun berjalan dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas produksi pangan, pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan daya saing yang berorientasi ekspor, dan peningkatan kapasitas SDM petani, yang akan dilakukan pendalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4. Komisi IV DPR RI mengkritisi pelaksanaan program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang dinilai masih bermasalah. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta agar program ini dihentikan sementara pada tahun 2022 dan Kementerian Pertanian agar fokus kepada intensifikasi pertanian.
- 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan

produksi, apabila pada minggu terakhir di bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan dan dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat kerja selanjutnya.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merancang kebijakan pakan ayam bermutu dan berbasis bahan baku lokal, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, sehingga pakan menjadi lebih murah dan terjangkau oleh peternak rakyat.
7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan rayonisasi PT Pupuk Indonesia *Holding Company* sepanjang tidak ada penambahan biaya operasional, lebih efisien, dan tidak berpengaruh pada pengurangan jumlah pupuk subsidi yang disalurkan, dan akan dialami melalui rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151